

DAFTAR PUSTAKA

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2006 Peraturan Nomor 269/MENKES/PER/111/2008, tentang Rekam Medis. Jakarta: Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia
2. Setiady,Tolib.2009.Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung : Alfabeta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2010. Peraturan Permenkes No.147 tahun 2010, tentang perijinan rumah sakit.Jakarta:Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia
4. Gibony,JR.1991.*Medical Records.Principle Of Hospotal Administrarion*.GP Putmans'Record Co.Berwyn
5. Budi M.Ph.2011.Manajemen Unit Kerja Rekam Medis.Jakarta,Quantum Sinergi
6. Soeparto,Pitono.2006.Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan(edisi kedua).Jakarta.Airlangga University Press
7. Huffman,Edna.K,RRA.1994.*Health Information Management*.USA : *Physician's Record Company*, Brwyn,Ilionis
8. Siswati,Sri.2013.Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers
9. Hendrik.2011.Etika dan Hukum Kesehatan.Jakarta:EGC
10. Hadi,Mulyo,Sh. KOLONEL POLISI NRP. 47050178.2000.Ketentuan Visum.Jakarta

11. Prosedur Tetap Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis. Rumah Sakit Umum Daerah dr.M. Ashari. Pematang
12. Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
13. NST, Utami Rizki Anggi. 2011. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kota Medan tentang Visum Et Repertum. Medan, Universitas Sumatra Utara
14. Van De Fas. 1981. Kamus Hukum Bahasa Indonesia cetak ke-2. Jakarta: Timur Mas
15. Soeparmono, R. 2002. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju
16. <http://moduldanskill.blogspot.co.id/2011/07/makalah-visum-et-repertum.html>
17. Wahjuningati, Edy. 2011. Rekam Medis dan Aspek Hukumnya Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Surabaya
18. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Perdata
Kitab Undang-undang Pidana
19. Al-Assaf, A.F. 2003. Mutu Pelayanan Kesehatan Perspektif Internasional. Buku Kedokteran. Jakarta
20. Juliasuratna. 2014. Peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Fakultas Hukum Pidana. Universitas Hasanudin Makassar. Makassar